

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

PEMERINTAHAN

Cegah Pemborosan dalam APBD 2020

JAKARTA, KOMPAS — Semua satuan kerja perangkat daerah diminta menyisir ulang program-program dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020.

Arahan itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI dalam rapat tertutup Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rancangan APBD 2020 di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/10/2019).

"(Pembahasan) tadi lebih pada perintah menyisir ulang semua anggaran agar tidak muncul duplikasi. Kedua, alat yang belum habis jangan belanja lagi. Jangan ada pengeluaran yang tidak perlu," ujar Anies.

Ia mencontohkan, apabila ada dinas-dinas yang mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan teknologi, anggaran itu seharusnya dihapus. Sebab, semua telah disiapkan di unit pengelola Jakarta Smart City. Ia juga meminta dilakukan pengkajian ulang terhadap semua kegiatan pembangunan di Jakarta, mulai dari penggunaan bahan material hingga pengerjaannya. Pengecekan bisa diselesaikan dalam waktu dua hari ke depan. Anies yakin target pengesahan APBD 2020 akhir November ini tercapai.

Dana hibah tinggi

Dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI dengan SKPD terkait KUA-PPAS 2020, muncul sejumlah persoalan, salah satunya alokasi belanja hibah tinggi. Di rancangan KUA-PPAS

2020, anggaran dana hibah Rp 2,84 triliun. Alokasi itu naik sejak 2017 (Rp 1,47 triliun), APBD Perubahan 2018 (Rp 1,88 triliun), dan APBD Perubahan 2019 (Rp 2,75 triliun).

Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi, mempertanyakan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI memberikan hibah kepada sejumlah instansi. "Apakah kita punya kewajiban hibah sebesar itu, sedangkan kebutuhan masyarakat kita masih banyak," kata Viani.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Edi Su-mantri menjelaskan, belanja hibah paling besar digunakan untuk dana bantuan operasional sekolah (BOS), mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA/SMK. Be-

lanja hibah dana BOS itu mencapai Rp 813 miliar. "Jadi, seluruh belanja hibah ini kembali kepada masyarakat," ujar Edi.

Sementara itu, Pemprov DKI dihadapkan pada realisasi penerimaan pajak daerah yang jauh dari target di APBD Perubahan 2019. Sampai 17 Oktober 2019, total realisasi penerimaan baru Rp 31,56 triliun. Padahal, target penerimaan di APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 44,54 triliun. Praktis masih kurang Rp 12,97 triliun.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, pendapatan daerah itu tak bisa disebut belum terealisasi karena masih ada dua bulan sampai pendapatan daerah ditutup pada 31 Desember 2019. Kini, pihaknya berupaya menggugah kesadaran masyarakat agar taat bayar pajak. (BOW)